MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN

Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia selanjutnya disebut sebagai "Pihak-pihak" ;

dengan sasaran untuk mengembangkan hubungan persahabatan diantara kedua negara ;

mengingat adanya kepentingan bersama dalam peningkatan kerjasama dibidang peralatan, logistik dan industri pertahanan ;

menyadari bahwa kerjasama yang lebih erat di bidang ini akan bermanfaat bagi kedua belah pihak serta kedua industri pertahanan ;

berkeinginan untuk dapat mengambil manfaat dari teknologi dan kemampuan industri masing-masing dan untuk meningkatkan kerjasama diantara industri masing-masing ;

bermaksud untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang peralatan, logistik dan industri pertahanan dalam kerangka

pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian, sesuai dengan hukum internasional dan hukum serta peraturan yang berlaku di negara masing-masing pihak,

dengan ini menyetujui sebagai berikut :

PASAL I
TUJUAN

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam bidang peralatan, logistik dan industri pertahanan sesuai peraturan dan hukum nasional masing-masing. Untuk mencapai tujuan tersebut dan sejalan dengan kepentingan nasional masing-masing, Pihak-pihak akan saling bekerja sama dalam hal logistik pertahanan maupun pengadaan dan produksi peralatan pertahanan.

PASAL II
BENTUK-BENTUK KERJASAMA

Kerjasama dalam bidang peralatan, logistik dan industri pertahanan yang diatur oleh Memorandum Saling Pengertian ini meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut :

- Kerjasama dalam pengoperasian dan pengelolaan peralatan pertahanan.

- Kerjasama dalam pengalihan peralatan dan perlengkapan pertahanan serta jasa.

- Kerjasama pelatihan dibidang logistik.

- Penelitian dan pengembangan bersama serta produksi bersama peralatan yang menjadi kepentingan kedua belah pihak.

- Kerjasama dibidang ekspor kepada Pihak Ketiga dan pengadaan bersama peralatan pertahanan.

- Pertukaran informasi dan data tentang logistik dan industri pertahanan.

- Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar bersama mengenai logistik dan industri pertahanan.

- Hal-hal lain yang disetujui bersama.

PASAL III
PENGATURAN PELAKSANAAN

"Pihak-pihak" akan menandatangani Pengaturan Pelaksanaan yang berkenaan dengan aspek tertentu dari kerjasama ini apa bila diperlukan.

PASAL IV
KOMITE BERSAMA

1. Suatu Komite Bersama Indonesia - Italia dibidang peralatan, logistik dan industri pertahanan, selanjutnya disebut "Komite Bersama", akan dibentuk dengan tujuan untuk memprakarsai, mengkoordinasikan serta untuk memantau pelaksanaan-pelaksanaan berbagai kegiatan dalam kerangka Memorandum

Saling Pengertian ini. Komite Bersama akan membicarakan berbagai permasalahan dari kerjasama ini.

2. Komite Bersama akan terdiri tidak lebih dari tujuh orang pejabat perwakilan dari tiap Pihak. Komite Bersama diketuai bersama oleh Direktur Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Italia.

3. Komite Bersama dapat membentuk Sub-sub Komite guna menangani secara efektif proyek-proyek khusus untuk kepentingan bersama.

4. Komite Bersama pada prinsipnya akan bertemu sekali dalam setahun, secara bergantian di Indonesia dan Italia. Tanggal, tempat dan acara pertemuan akan disetujui oleh masing-masing ketua bersama.

5. Kantor Penghubung dari masing-masing pihak, untuk Indonesia adalah Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Dephankam, dan untuk Pihak Italia adalah Divisi Tiga dari Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

6. Tugas-tugas Komite Bersama adalah :

- Mengidentifikasi bidang-bidang yang berpotensi untuk diadakan kerjasama dibidang peralatan dan logistik serta industri pertahanan.

- Mengusulkan dan mendiskusikan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.

- Memprakarsai serta menyelenggarakan kegiatan kerjasama sesuai yang diatur dalam Pasal II.

- Mengawasi dan mengadakan peninjauan kembali berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini.

- Menyarankan diadakannya pengaturan pelaksanaan, jika dan bilamana diperlukan.

- Mengusulkan dan mempertimbangkan kemungkinan Amandemen dari Memorandum ini.

PASAL V
TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN PERJANJIAN

1. "Pihak-pihak" akan memberitahukan masing-masing Industri Pertahanannya atas prinsip-prinsip dasar dari Memorandum Saling Pengertian ini.

2. Sepanjang menyangkut kontrak-kontrak yang ditandatangani dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini, masing-masing Pihak dalam batas-batas kewenangannya, akan berusaha dengan sebaik-baiknya agar para kontraktor akan memenuhi kewajiban-kewajiban kontrak yang mereka sepakati.

PASAL VI
DUKUNGAN BERSAMA

1. Apabila salah satu Pihak menginginkan pengadaan perlengkapan pertahanan dari suatu perusahaan pemasok dari negara Pihak lain, serta meminta informasi yang berkaitan

dengan hal tersebut, Pihak yang lain akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memberikan bantuan tersebut melalui Komite Bersama atau Ketua Bersamanya masing-masing.

2. Dalam hal akan ditandatanganinya suatu kontrak tentang peralatan pertahanan maka :

a. Masalah "offset" dan imbal beli harus menjadi salah satu pertimbangan.

b. Pihak pembeli akan mendapat dukungan jaminan mutu sepenuhnya dari Badan Kendali Mutu (Quality Assurance Agency) pihak lainnya seperti yang berlaku untuk Angkatan Bersenjatanya sendiri.

3. Untuk pelatihan personil (termasuk aspek penggunaan dan pemeliharaan), Pihak pembeli akan mendapat dukungan dari Pihak lainnya, sesuai kesepakatan bersama, agar peralatan yang dibeli dapat diterima dan dioperasikan dalam jajaran Angkatan Bersenjatanya.

PASAL VII
ALOKASI ANGGARAN

Masing-masing Pihak akan menanggung biaya pengeluarannya sendiri selama pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan alokasi anggarannya.

PASAL VIII
HAK MILIK INTELEKTUAL

Hak dan kewajiban bagi masing-masing Pihak dalam bidang hak milik intelektual, hak cipta dalam wilayah negaranya,

pengiriman lisensi pabrik, penjualan kepada pihak-pihak ketiga dan perlindungan hak paten sehubungan dengan penemuan atau pengembangan yang dihasilkan dalam proyek-proyek bilateral akan ditentukan dalam Pengaturan Pelaksanaan (Implementing Arrangement).

PASAL IX
KONFIDENSIALITAS

Sampai dengan dan sebelum terbentuknya suatu perjanjian umum mengenai pengamanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia, akan diterapkan peraturan-peraturan di bawah ini :

a. Pihak-pihak berjanji sejauh kewenangannya masing-masing untuk melindungi informasi rahasia yang diterima dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya masing-masing.

b. Informasi dan peralatan yang bersifat rahasia hanya diberikan melalui saluran resmi atau saluran yang telah disetujui oleh Badan Keamanan yang telah ditentukan dari kedua belah pihak. Informasi dan peralatan tersebut akan diberi label tanda tingkat kerahasiaan serta negara asalnya, sebagai berikut :

INDONESIA	ITALIA	INGGRIS
SANGAT RAHASIA	SEGRETISSIMO	TOP SECRET
RAHASIA	SEGRETO	SECRET
KONFIDENSIAL	RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
TERBATAS	RISERVATO	RESTRICTED
BIASA	NON CLASSIFICATO	UNCLASSIFIED

c. Semua peralatan dan informasi yang diterima dalam rangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tidak boleh dialihkan, diberikan atau diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara waktu atau secara tetap, kepada Pihak Ketiga atau kepada orang-orang maupun badan/ kesatuan yang tidak berhak dan tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari Pihak pemberi.

PASAL X
KUNJUNGAN

Kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara Italia ke negara Pihak yang lain harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Pihak tuan rumah. Setiap permohonan untuk kunjungan harus diajukan melalui saluran yang resmi dan harus tunduk kepada ketentuan dari Pejabat yang berwenang dari negara Pihak tuan rumah. Permohonan tersebut harus berisi data pribadi dari pemohon, nama dari badan atau perusahaan resmi, maksud dan lamanya dari kunjungan serta Security Clearance / Penelitian Khusus yang menyatakan bahwa pengunjung tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dari negara Pihak pengunjung berasal.

PASAL XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perbedaan pendapat tentang interpretasi dan pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini, kedua belah pihak harus mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut pada tingkat Komite Bersama secara damai.

2. Apabila belum dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka kedua Ketua Komite Bersama akan meneruskan permasalahan pada pihak-pihak dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran resmi.

PASAL XII
MASA BERLAKU, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku mulai tanggal diterimanya pemberitahuan yang kedua secara resmi dari kedua belah pihak bahwa Memorandum Saling Pengertian ini telah melalui prosedur ratifikasi masing-masing dan akan terus berlaku selama 5 tahun. Kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai ketentuan paragraf 3 dari pasal ini, harus dianggap diperpanjang untuk 5 (lima) tahun lagi.

2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat di amandemen setiap waktu dengan persetujuan bersama secara tertulis antara "Pihak-pihak".

3. Memorandum Saling Pengertian ini dapat dihentikan setiap waktu oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelumnya.

4. Pengakhiran tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau kelanjutan dari setiap kontrak yang telah ditandatangani dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL XIII
PERLINDUNGAN DAN PENGAKHIRAN

Tanggung jawab masing-masing dari kedua belah pihak dalam bidang pengamanan, perlindungan dan pengalihan peralatan serta informasi yang diterima seperti ditetapkan dalam Pasal VIII, IX dan XI akan terus berlaku meskipun masa berlaku dari Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini sesuai kewenangan dalam pemerintahan masing-masing, telah menandatangani persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal Delapan Belas bulan Pebruari pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, dalam dua naskah asli, dalam bahasa Indonesia, bahasa Italia dan bahasa Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang menentukan.

UNTUK DEPARTEMEN
PERTAHANAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK KEMENTERIAN
PERTAHANAN
REPUBLIK ITALIA

ACCORDO

TRA

IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA INDONESIANA

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA

ACCORDO

TRA

IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA INDONESIANA

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI

DEGLI IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA

Il Dipartimento della Difesa e della Sicurezza della REPUBBLICA INDONESIANA e il Ministero della Difesa della REPUBBLICA ITALIANA in seguito chiamati "parti",

- al fine di sviluppare amichevoli rapporti tra i due Paesi;

- considerato il comune interesse a promuovere la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la Difesa;

- riconosciuto una piu' stretta collaborazione in questi settori sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti, oltre che a entrambe industrie per la Difesa;

- desiderando trarre dei benefici dalle proprie capacita' tecnologiche e industriali e volendo promuovere la cooperazione tra le proprie industrie;

- disposti a favorire la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la Difesa, nell'ambito del presente Accordo in conformita' a leggi internazionali e a leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Stati,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

SCOPO

Scopo del presente Accordo e' favorire la cooperazione bilaterale nel settore degli impianti, della logistica e dell'industria per la Difesa, in conformita' alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti nazionali.
Per raggiungere questo scopo e nel reciproco interesse nazionale, le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione reciproca con particolare riferimento alla logistica della Difesa oltre che all'approvvigionamento e alla produzione di impianti per la Difesa.

ARTICOLO II

FORME DI COOPERAZIONE

La cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria della Difesa, trattata nel presente Accordo, puo' comprendere le seguenti forme:
- cooperazione nel settore dell'uso e della gestione di impianti della Difesa;
- cooperazione nel trasferimento di articoli, impianti e servizi della Difesa;
- cooperazione sull'addestramento per la logistica;
- ricerca e sviluppo, insieme, oltre alla produzione di oggetti di interesse comune;
- cooperazione per le esportazioni a terzi oltre che approvviggionamento reciproco di impianti per la Difesa;
- scambio di informazioni e dati sulla logistica e sull'industria per la Difesa;
- scambio di seminari e riunioni miste sulla logistica e sull'industria per la Difesa;
- altre aree di cooperazione come stabilito di comune accordo da entrambe le Parti.

ARTICOLO III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Su richiesta, le Parti stabiliranno particolari disposizioni di attuazione riguardanti specifici aspetti di questa cooperazione.

ARTICOLO IV

COMITATO MISTO

1) Allo scopo di avviare, coordinare controllare le attivita' eseguite nell'ambito del presente Accordo, sara' istituito un Comitato Misto Indonesia-Italia sui settori degli impianti, la logistica e l'industria della Difesa, di seguito chiamato "Comitato Misto".
Il Comitato Misto discutera' i diversi aspetti di questa cooperazione.

2) Il Comitato Misto sara' composto da non piu' di sette rappresentanti ufficiali di ciascuna Parte. Il Comitato Misto sara' presieduto dal Direttore Generale per i Materiali, le Strutture e i Servizi del Dipartimento di Difesa e Sicurezza della Repubblica Indonesiana e dal Segretario Generale della Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica italiana.

3) Il Comitato Misto puo' istituire dei sotto-comitati per affrontare in maniera efficace specifici progetti di interesse comune.

4) Il Comitato Misto si incontrera', in linea di massima, una volta l'anno, alternativamente in Indonesia e in Italia. La data, la sede e l'agenda saranno concordati dai due Presidenti.

5) I punti di contatto delle Parti saranno l'Ufficio per le Relazioni Pubbliche e la Cooperazione estera del Dipartimento della Difesa e della Sicurezza, per l'Indonesia, e il Terzo reparto dell'Ufficio del Segretario Geneale della Difesa, per l'Italia.

6) Gli incarichi del Comitato Misto saranno:

(a) identificare potenziali aree di cooperazione nel settore degli impianti e della logistica della Difesa oltre che in quello industriale;

(b) proporre e discutere argomenti di comune interesse;

(c) avviare e organizzare le atttivita' di cooperazione definite nell'articolo II ;

(d) controllare e rivedere le diverse attivita' iniziate nell'ambito del presente Accordo;

(e) consigliare disposizioni di attuazione, quando e se richiesto;

(f) proporre e prendere in considerazione possibili emendamenti al presente Accordo.

ARTICOLO V

IMPEGNI CONTRATTUALI

1) Le Parti informeranno le rispettive industrie per la Difesa di principi di base del presente Accordo.

2) Per quanto riguarda i contratti conclusi in relazione al presente Accordo, ogni Parte, nell'ambito delle proprie responsabilita', fara' tutto il possibile affinche' i Contraenti adempiano gli obblighi contrattuali assunti.

ARTICOLO VI

SUPPORTO RECIPROCO

1) Se una Parte intende acquistare impianti per la Difesa da una ditta fornitrice dello Stato dell'altra Parte, e richiede le relative informazioni, l'altra Parte fara' del proprio meglio per collaborare attraverso il Comitato Misto o i due Presidenti.

2) Se dovesse essere firmato un contratto per gli impianti per la Difesa:

(a) Si dovranno considerare la compensazione e i contro-acquisti.

(b) La Parte acquirente otterra' l'appoggio completo dell'Ufficio di Garanzia della Qualita' dell'Altra Parte a condizioni simili a quelle applicate per le proprie Forze Armate.

3) Per l'addestramento del proprio personale (compresi gli aspetti connessi con l'uso, oltre alla manuntenzione), la Parte acquirente ricevera' il supporto

dell'altra Parte in termini concordati insieme, al fine di facilitare l'entrata in servizio dell'impianto per la difesa acquistato.

ARTICOLO VII

ASSEGNAZIONI DI BILANCIO

Ogni parte sosterra' le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo nell'ambito delle proprie assegnazioni finanziarie.

ARTICOLO VIII

PROPRIETA' INTELLETTUALE

I diritti e gli impegni di ogni Parte nel campo della proprieta'intellettuale, dei diritti d'autore nel proprio territorio, della consegna di licenze di produzione, di vendita a Terzi e protezione del brevetto relativo all'innovazione o allo sviluppo elaborato nell'ambito dei progetti bilaterali, saranno definiti nelle disposizioni di attuazione.

ARTICOLO IX

SEGRETEZZA

Sino alla determinazione di un Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della REPUBBLICA INDONESIANA e quello della REPUBBLICA ITALIANA, saranno applicate le seguenti regole:

(a) Le Parti si impegnano a proteggere le informazioni classificate alle quali possono accedere nell'ambito del presente Accordo conformemente alle proprie leggi e ai regolamenti nazionali.

(b) Le informazioni e gli impianti classificati vengono forniti solo attraverso canali ufficiali o tramite canali concordati dagli uffici di sicurezza delle Parti designate, Queste informazioni e questi impianti sono etichettati con l'indicazione del livello di classificazione e dello Stato di origine. come segue:

INDONESIANO	ITALIANO	INGLESE
SANGAT RAHASIA	SEGRETISSIMO	TOP SECRET
RAHASIA	SEGRETO	SECRET
KONFIDENSIAL	RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
TERBATAS	RISERVATO	RESTRICTED
BIASA	NON CLASSIFICATO	UNCLASSIFIED

(c) Tutti gli impianti e le informazioni ricevute nell'ambito del presente Accordo non saranno trasferite, rivelate o rilasciate, direttamente o indirettamente, su base temporanea o permanente, a terzi o a persone non autorizzate o a entita' senza un precedente consenso scritto della Parte originante.

ARTICOLO X

VISITE

Le visite dei rappresentanti indonesiani o italiani nello Stato dell'altra Parte avverranno in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore nello Stato della Parte ospitante.
Ogni richiesta di visita sara' presentata attraverso canali ufficiali e sara' soggetta all'autorizzazione della relativa autorita' dello Stato della Parte ospitante. Conterra' i dati del Personale richiedente, il nome dell'Ufficio o della ditta, lo scopo e la durata della visita, oltre al nulla osta di segretezza in possesso del visitatore, come stabilito dai regolamenti dello Stato della Parte di origine.

ARTICOLO XI

RISOLUZIONE DELLE DISPUTE

1) Nel caso di una disputa riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo, entrambe le Parti avranno dei colloqui a livello di Comitato Misto al fine di risolvere in modo amichevole la disputa.

2) Nel caso non si arrivi ad una soluzione a questo livello, entrambi i Presidenti del Comitato Misto riferiranno l'argomento alle Parti, se necessario attraverso canali ufficiali.

ARTICOLO XII

ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI E TERMINE

1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica con la quale le Parti comunicheranno ufficialmente l'adempimento delle rispettive procedure di ratifica e rimarra' in vigore per un periodo di cinque (5) anni.

A meno di recesso da parte di una delle Parti, in accordo a quanto stabilito al paragrafo 3 di questo articolo, l'Accordo stesso si riterra' rinnovato per un periiodo di ulteriori cinque anni.

2) Puo' essere emendato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti.

3) Puo essere risolto in ogni momento da entrambe le Parti dandone notifica (180) centottanta giorni prima.

4) Il termine dell'Accordo non influenzera' la validita' o la durata di qualsiasi contratto in corso concluso nel suo ambito.

ARTICOLO XIII

PROTEZIONE E TERMINE

Le rispettive responsabilita di entrambe le parti nel campo della sicurezza, protezione e transferimento del materiale ricevuto e informazione, come definite negli Articoli VIII, IX e XI, continueranno a sussistere anche dopo il termine del presente Accordo

A testimonianza di cio' i sottoscritti Rappresentanti, nell'ambito della propria compentenza governativa, hanno firmato il presente Accordo.

Firmato a Jakarta **il** dicio Ho Febbraio **in due originali in lingua Indonesiana, Italiana e Inglese e tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in Inglese.**

PER IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA INDONESIANA

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE
OF
THE ITALIAN REPUBLIC

CONCERNING

COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE
OF
THE ITALIAN REPUBLIC

CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY

The Department of Defence & Security of the Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of the Italian Republic, hereinafter referred to as the "Parties"

aiming at development of friendly relations between the two Countries;

considering their common interest in promoting cooperation in defence equipment, logistics and industry

recognizing that closer cooperation in these fields will be beneficial to both Parties as well as both defence industries;

desiring to draw the benefit from their technological and industrial capabilities and to promote the cooperation among their own industries;

willing to promote cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry within the framework of the present MOU in conformity with international laws, and laws and regulations in force in the State of each Party,

have agreed as follows :

ARTICLE I
PURPOSE

The purpose of the present MOU is to promote bilateral cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry in compliance with the respective national laws and regulations.
To achieve this purpose and in the respective national interests, the Parties will enggage themselves in fostering mutual cooperation with particular reference to the defence logistics as well as procurement and production of defence equipment.

ARTICLE II
FORMS OF COOPERATION

Cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry covered by the present MOU, may include the following forms :

- cooperation in operation and management of defence equipment ;
- cooperation in transfering of defence articles, equipment and services ;
- cooperation on logistics training ;
- joint research and development as well as production on subject of mutual interest ;
- cooperation in exports to third parties as well as mutual procurement of defence equipment ;
- exchange of information and data on defence logistics and industry ;
- convening of joint seminars and meetings on defence logistics and industry ;
- other areas of cooperation as mutually agreed upon by both Parties.

ARTICLE III
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

The Parties shall conclude particular implementing arrangements pertaining to spesific aspects of this cooperation, if required.

ARTICLE IV
JOINT COMMITTEE

1) An Indonesian-Italian defence equipment, logistics and industry Joint Committee hereinafter referred to as the "Joint Committee" shall be formed for the purpose of initiating, coordinating and monitoring the different activities carried out in the framework of the present MOU. The Joint Committee shall discuss the various issues of this cooperation.

2) The Joint Committee will be composed of no more than seven official representatives from each Party. The Joint Committee will be Co-chaired by the Director General for Materiel, Facility and Services of the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia and the Secretary General of the Ministry of Defence of the Italian Republic.

3) The Joint Committee may establish subcommittees to effectively address specific projects of mutual interest.

4) The Joint Committee will meet in principle, once a year, alternately in Indonesia and Italy. The date, site and agenda will be agreed upon between the Co-chairmen.

5) The points of contact of the Parties will be on the Indonesian side the Public Relations and Foreign Cooperation Bureau of the Department of Defence & Security and on the Italian side, the Third Division of the Office of the Secretary General of Defence.

6) The tasks of the Joint Committee will be :

(a) To identify potential areas of cooperation in defence equipment and logistics as well as industry ;

(b) To propose and discuss items of common interest ;

(c) To initiate and organize the cooperative activities defined in article II ,

(d) To monitor and review the different activities initiated in the framework of the present MOU.

(e) To recommend implementing arrangements, if and when required ;

(f) To propose and take into consideration possible amendment to this Memorandum.

ARTICLE V
CONTRACTUAL COMMITMENTS

1) The Parties will inform their respective defence industries about the basic principles of the present MOU.

2) As far as contracts concluded within the framework of the present MOU are concerned, each Party, within its field of responsibilities, will make its best endeavour to obtain that contractors fulfil all contractual obligation undertaken.

ARTICLE VI
MUTUAL SUPPORT

1) If one Party contemplates procuring defence equipment from a supplying company from the state of the other Party, and requests related information, the other Party will make its best efforts to assist it through the Joint Committee or its Co-chairmen.

2) Should any contract for defence equipment be signed :

(a) Offset and counter purchase should be considered.

(b) The procuring Party will get from the other Party the full support of its Quality Assurance Agency on conditions similar to those applied for its own Armed Forces.

3) For the training of its personnel (including aspects of utilization as well as maintenance), the procuring Party shall receive the support of the other Party on mutually agreed terms, in order to facilitate the entry into service of the defence equipment procured.

ARTICLE VII
BUDGETARY ALLOCATIONS

Each Party shall bear its own respective expenses during the implementation of the present MOU in accordance with its budgetary allocations.

ARTICLE VIII
INTELLECTUAL PROPERTY

The rights and obligations of each Party in the field of intellectual property, copyright in its State territory, delivering of manufacturing licences, sale to third parties and protection of patent related to innovation or development elaborated in bilateral projects shall be defined in the implementing arrangements.

ARTICLE IX
CONFIDENTIALITY

Until and prior to the settlement of a general security agreement between the government of the Republic of Indonesia and the Italian Republic, the following rules will apply :

(a) The Parties commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of the present MOU in accordance with their national laws and regulations.

(b) Classified information and equipment are only provided through official channels or by channels agreed upon by designated security agencies of the Parties. These information and equipment are labelled

with the indication of their classification level and State of origin as follows :

INDONESIAN	ITALIAN	ENGLISH
SANGAT RAHASIA	SEGRETISSIMO	TOP SECRET
RAHASIA	SEGRETO	SECRET
KONFIDENSIAL	RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
TERBATAS	RISERVATO	RESTRICTED
BIASA	NON CLASSIFICATO	UNCLASSIFIED

(c) All equipment and information received in the framework of the present MOU shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third Parties or unauthorized persons and entities without the prior written consent of the originating Party.

ARTICLE X
VISITS

Visits undertaken by Indonesian or Italian nationals in the State of the other Party shall take place in accordance with the laws and regulations in force in the State of the host Party.
Each application for visits shall be submitted through official channels and shall be subject to authorization of the relevant authority of the State of the host Party. It shall contain the applicant personal data, the name of the official agency or company, the purpose and duration of the visit as well as the security clearance under which the visitor has been qualified as defined by the regulations of the State of the Party of origin.

ARTICLE XI
SETTLEMENT OF DISPUTES

1) In the event of any dispute concerning the interpretation and implementation of the present MOU, both Parties shall hold talks at the Joint Committee level in order to settle the dispute amicably.

2) In the event of a failure of settlement at this level, both Co-chairmen of the Joint Committee shall refer the matter to the Parties, if necessary through official channels.

ARTICLE XII
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS AND TERMINATION

1) The present MOU shall enter into force on the date of receipt of the second notification with which the Parties will communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures and remain inforce for a period of five (5) years. Unless terminated by either Party in accordance with paragraph 3 of this articles, it shall be deemed to have been extended for a further period of five (5) years.

2) It can be amended at any time by mutual written agreement between the Parties.

3) It can be denounced at any time by either Party by giving a prior notification of one hundred eighty (180) days.

4) Its termination shall not affect the validity or duration of any ongoing contracts concluded within its framework.

ARTICLE XIII
PROTECTION AND TERMINATION

The respective responsibilities of both Parties in the field of security, protection and transfer of received equipment and information, as defined in Articles VIII, IX and XI, shall continue to apply even after the termination of the present MOU.

In witness thereof the undersigned Representatives, within their governmental competence, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Jakarta on the Eighteenth of february in nineteen hundred ninety seven in two originals, in Indonesian, Italian and English languages, all texts are equally authentic.
In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE DEPARTMENT
OF DEFENCE AND SECURITY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE ITALIAN REPUBLIC